



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dugaan Belanja Fiktif Satpol PP Ke Penyidik

BENGKULU - Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi pada tahap penyelidikan dan dilanjutkan dengan melakukan ekspos internal. Akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menaikkan status perkara dugaan korupsi belanja fiktif Satpol PP Kota Bengkulu tahun 2019 ke tingkat penyidikan.

Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH mengatakan setelah menaikkan status perkara ini, maka dalam waktu dekat kembali akan menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang pada tahap penyelidikan juga telah dilakukan pemeriksaan.

"Sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Saksi yang sebelumnya telah kita periksa, kembali akan kita panggil untuk dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan ini," terang Emilwan.

Ketika ditanya siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan di tahap penyidikan ini, Emilwan memastikan pejabat internal Satpol PP Kota Bengkulu semua bakal diperiksa. Karena penyidik Pidsus membutuhkan banyak bukti tambahan di tahap penyidikan ini.

"Yang jelas, dari internal Satpol PP pasti bakal kita periksa kembali ditahap penyidikan ini," ucap Emilwan.

Emilwan menambahkan sebelum perkara ini naik ke penyidikan, pihaknya telah berkoordinasi ke Inspektorat Kota Bengkulu. Ini terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan audit hasil ketaatan terhadap kegiatan di Satpol PP Kota Bengkulu tahun 2019.

"Di tahap penyelidikan lalu, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu belum diperiksa, pada tahap penyidikan ini kita akan panggil untuk dimintai keterangan," ujar Emilwan.

Untuk diketahui dugaan korupsi di tubuh Satpol PP Kota Bengkulu, terjadi pada honor ratusan petugas Satpol PP Kota Bengkulu yang melakukan pengamanan pemilu April 2019 lalu di setiap Kecamatan dan Kelurahan tidak dibayarkan. Selain itu dugaan korupsi juga terjadi pada belanja makan dan minum yang juga diduga fiktif, dengan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar. (aba)